

LAPORAN KEUANGAN POKOK
KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2017
(AUDITED)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*).

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2017 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 18 April 2018

Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP. 19620402 198203 1 001

DAFTAR ISI

KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	21
B.2. Belanja	24
B.3. Belanja Pegawai	24
B.4. Belanja Barang	26
B.5. Belanja Modal	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Kas Lainnya dan Seara Kas	28
C.2. Belanja dibayar Dimuka	28
C.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendahraan/ Tuntutan Ganti Rugi	30
C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendahraan/ Tuntutan Ganti Rugi	32
C.5. Persediaan	33
C.6. Tanah	34
C.7. Peralatan dan Mesin	34
C.8. Gedung dan Bangunan	35
C.9. Jalan, Irigasi dan Jaringan	36
C.10. Aset Tetap Lainnya	36

KETERANGAN	Halaman
C.11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	37
C.12. Aset Tak Berwujud	38
C.13. Aset Lain-lain	38
C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	39
C.15. Utang Kepada Pihak Ketiga	39
C.16. Pendapatan Diterima Dimuka	40
C.17. Utang Jangka Pendek Lainnya	40
C.18. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1. PNBPN	42
D.2. Beban Pegawai	42
D.3. Beban Persediaan	43
D.4. Beban Barang dan Jasa	44
D.5. Beban Pemeliharaan	46
D.6. Beban Perjalanan Dinas	47
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	48
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	49
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	49
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49
D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	50
D.13. Surplus / Defisit – LO	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	51
E.2. Surplus (Defisit) LO	51
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	51
E.4. Transaksi Antar Entitas	51
E.5. Ekuitas Akhir	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2017 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 18 April 2018

Sekretaris Jenderal,

Danang Wijayanto
NIP.19620402 198203 1 001



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk tahun anggaran 2017 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2018
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 195907021987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2017 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp163.139.211,00 dengan Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp116.001.084.414,00 atau mencapai 96,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp119.740.982.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp118.353.209.638,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.042.108.599,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp116.791.019.011,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp520.082.028,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp204.893.291,00 dan Rp118.148.316.347,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp78.157.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp118.704.767.443,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai (Rp118.626.610.443,00). Kegiatan Non Operasional *surplus* sebesar Rp40.266.339,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp118.586.344.104,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp120.896.715.248,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp118.586.344.104,00) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp115.837.945.203,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp118.148.316.347,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017			31 DESEMBER 2016
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISIASI
PENDAPATAN				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	163.139.211,00	~	119.418.330,00
Jumlah Pendapatan	0,00	163.139.211,00	~	119.418.330,00
BELANJA				
1. Belanja Pegawai	31.155.917.000,00	29.230.307.707,00	93,82	22.652.288.762,00
2. Belanja Barang	85.253.087.000,00	83.458.856.862,00	97,90	78.811.403.986,00
3. Belanja Modal	3.331.978.000,00	3.311.919.845,00	99,40	2.383.987.214,00
Jumlah Belanja	119.740.982.000,00	116.001.084.414,00	96,88	103.847.679.962,00

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	39.433.340,00	(39.433.340,00)	(100,00)
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	442.033.463,00	559.583.369,00	(117.549.906,00)	(21,01)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	4.198.210.301,00	(4.198.210.301,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	(4.198.210.301,00)	4.198.210.301,00	(100,00)
Persediaan	600.075.136,00	1.230.541.937,00	(630.466.801,00)	(51,23)
Jumlah Aset Lancar	1.042.108.599,00	1.829.558.646,00	(787.450.047,00)	(43,04)
Aset Tetap				
Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	48.589.855.918,00	46.258.991.222,00	2.330.864.696,00	5,04
Gedung dan Bangunan	71.676.580.588,00	71.382.249.738,00	294.330.850,00	0,41
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	3.530.800.628,00	58.069.000,00	1,64
Aset Tetap Lainnya	1.256.182.536,00	1.206.231.036,00	49.951.500,00	4,14
Akumulasi Penyusutan	(55.508.859.059,00)	(51.054.687.626,00)	(4.454.171.433,00)	8,72
Jumlah Aset Tetap	116.791.019.011,00	118.511.974.398,00	(1.720.955.387,00)	(1,45)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	2.304.693.472,00	2.260.693.472,00	44.000.000,00	1,94
Aset Lain-lain	522.029.174,00	0,00	522.029.174,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.306.640.618,00)	(1.512.294.504,00)	(794.346.114,00)	52,52
Jumlah Aset Lainnya	520.082.028,00	748.398.968,00	(228.316.940,00)	(30,50)
Jumlah Aset	118.353.209.638,00	121.089.932.012,00	(2.736.722.374,00)	(2,26)
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	131.992.624,00	143.270.757,00	(11.278.133,00)	(7,87)
Pendapatan di terima di muka	72.900.667,00	10.512.667,00	62.388.000,00	593,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	39.433.340,00	(39.433.340,00)	(100,00)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	Jumlah	%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	204.893.291,00	193.216.764,00	11.676.527,00	6,04
Jumlah Kewajiban	204.893.291,00	193.216.764,00	11.676.527,00	6,04
Ekuitas Dana				
Ekuitas	118.148.316.347,00	120.896.715.248,00	(2.748.398.901,00)	(2,27)
Ekuitas Dana	118.148.316.347,00	120.896.715.248,00	(2.748.398.901,00)	(2,27)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	118.353.209.638,00	121.089.932.012,00	(2.736.722.374,00)	(2,26)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	78.157.000,00	82.427.860,00	(4.270.860,00)	(5,18)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	78.157.000,00	82.427.860,00	(4.270.860,00)	(5,18)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	29.230.307.707,00	22.652.288.762,00	6.578.018.945,00	29,03
Beban Persediaan	1.029.249.567,00	1.473.298.899,00	(444.049.332,00)	(30,13)
Beban Barang dan Jasa	38.057.759.596,00	38.285.784.757,00	(243.252.650,00)	(0,63)
Beban Pemeliharaan	5.672.595.978,00	4.991.532.740,00	681.063.238,00	13,64
Beban Perjalanan Dinas	38.922.319.607,00	33.196.672.821,00	5.725.646.786,00	17,24
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	534.743.742,00	3.907.778,00	530.835.964,00	13.284,08
Beban Penyusutan & Amortisasi	5.257.791.246,00	5.429.670.896,00	(171.879.650,00)	(3,17)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	118.704.767.443,00	106.033.156.653,00	12.671.610.790,00	11,95
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(118.626.610.443,00)	(105.950.728.793,00)	(12.675.881.650,00)	11,95
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	100.000,00	1.900.000,00	(1.800.000,00)	(94,74)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2.840.926,00	229.715.469,00	(226.874.543,00)	(98,76)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(2.740.926,00)	(227.815.469,00)	225.074.543,00	(98,80)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	50.614.737,00	172.276.658,00	(121.661.921,00)	(70,62)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.607.472,00	159.526.843,00	(151.919.371,00)	(95,23)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	43.007.265,00	12.749.815,00	30.257.450,00	237,32
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	40.266.339,00	(215.065.654,00)	255.331.993,00	(118,72)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(118.586.344.104,00)	(106.165.794.447,00)	(12.420.459.657,00)	11,70

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	120.896.715.248,00	124.926.069.695,00	(4.029.354.447,00)	(3,22)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(118.974.527.030,00)	(106.165.794.447,00)	(12.420.549.657,00)	12,06
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	0,00	(1.591.821.632,00)	1.591.821.632,00	(100,00)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	~
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00	(1.591.821.632,00)	1.591.821.632,00	(100,00)
Koreksi Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	115.837.945.203,00	103.728.261.632,00	12.109.683.571,00	11,67
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2.748.398.901,00)	(4.029.354.447,00)	1.280.955.546,00	(31,79)
EKUITAS AKHIR	118.148.316.347,00	120.896.715.248,00	(2.748.398.901,00)	(2,27)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "checks and balances" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Meja kehormatan, keluhuan martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan

berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Hakim dan Hakim Agung yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap

Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam

penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp163.139.211,00

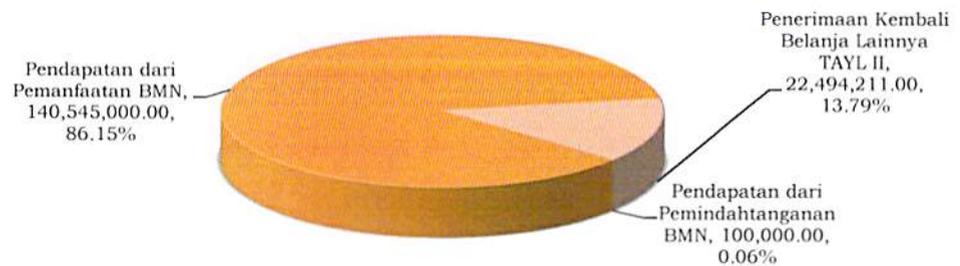
B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp163.139.211,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	100.000,00	~
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0,00	140.545.000,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL II	0,00	22.494.211,00	~
Jumlah	0,00	163.139.211,00	~

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2017



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2017 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Per 31 Desember Tahun 2017 sebesar Rp100.000,00. Hasil Bersih Lelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 476/61/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Pendapatan tersebut terkait Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.

2. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.545.000,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas Kantor Kas BRI dan Ruangan ATM BRI sebesar Rp124.776.000,00 periode 02 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sesuai Perjanjian No:PERJ.02/UM-KY/I/2017 Tanggal 02 Januari 2017.
 - b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas Kios/Kantin Komisi Yudisial RI seluas 69,3m² sebesar Rp15.769.000,00 periode 4 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018 sesuai dengan Perjanjian No:PERJ-01/BU.KY/9/2017 Tanggal 04 September 2017.
3. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.494.211,00 yaitu berupa:

- a) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2017 sebesar Rp398,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengembalian Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Mei Tahun 2017 sesuai dengan SPM No.00282/KYRI/2017 Tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp206,00.
 - 2) Pengembalian Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Mei Tahun 2017 sesuai dengan SPM No.00283/KYRI/2017 Tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp192,00.
- b) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.493.813,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengembalian pajak uang saku rapat dalam kantor yg belum dipotong a/n. RDT dkk sebesar Rp4.290.000,00.
 - 2) Pengembalian Honorarium Anggota Tim SK 33/SET/KP.07.01/01/2016 sebesar Rp4.750.000,00.
 - 3) Pengembalian pajak uang saku rapat dalam kantor yg belum dipotong pada Biro Investigasi, a/n. Johanes Kwartanto dkk sebesar Rp2.535.000,00.
 - 4) Pengembalian kekurangan volume pekerjaan dengan nomor SPK 138/SPK/PPK-1.KY/02/2016 sebesar Rp1.567.563,00.

- 5) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KYRI TA 2016 terkait dengan Pajak Uang Saku Rakor Biro RENKI sebesar Rp5.520.000,00.
- 6) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KYRI TA 2016 terkait dengan Pajak Uang Saku Rakor Biro Investigasi sebesar Rp3.225.000,00.
- 7) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KYRI TA 2014 terkait kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber. Sebesar Rp606.250,00

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 36,61 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	100.000,00	1.900.000,00	(94,74)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	140.545.000,00	15.769.000,00	791,27
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	4.270.860,00	(100,00)
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	22.494.211,00	97.478.470,00	(76,92)
Jumlah	163.139.211,00	119.418.330,00	36,61

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2017 dengan 2016 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2017 dengan 2016



Realisasi Belanja
Negara
Rp116.001.084.414,00

B.2. Belanja

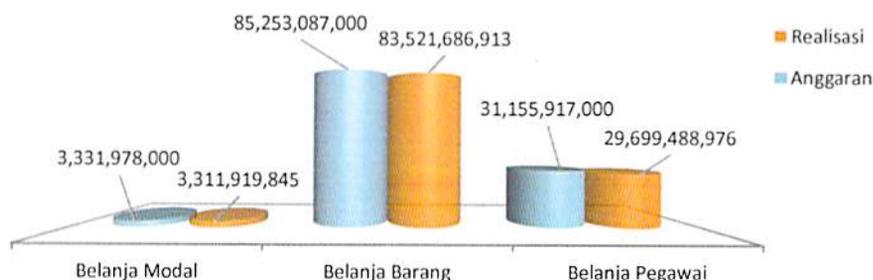
Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp116.001.084.414,00 atau 96,88% dari anggaran belanja sebesar Rp119.740.982.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai	31.155.917.000,00	29.699.488.976,00	95,33
Belanja Barang	85.253.087.000,00	83.521.686.913,00	97,97
Belanja Modal	3.331.978.000,00	3.311.919.845,00	99,40
Total Belanja Kotor	119.740.982.000,00	116.533.095.734,00	97,32
Pengembalian Belanja	0,00	(532.011.320,00)	~
Jumlah	119.740.982.000,00	116.001.084.414,00	96,88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017



Belanja Pegawai
Rp29.230.307.707,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp29.230.307.707,00 dan Rp Rp22.652.288.762,00. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 29,04 persen dari 31 Desember 2016.

Kenaikan signifikan terdapat pada Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara sebesar 494,30 persen dan Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara sebesar 1.167,96 persen disebabkan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas

Anggota Komisi Yudisial.

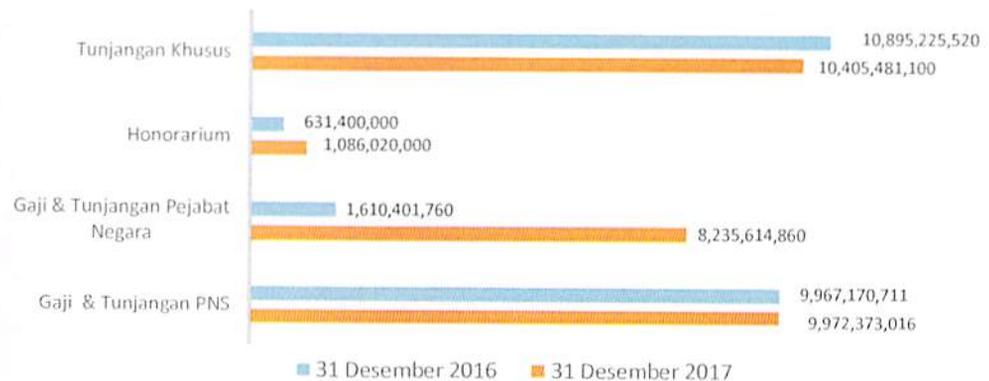
Tabel 4
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi	Realisasi	Naik
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	(Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	7.220.879.850,00	7.031.763.960,00	2,69
Belanja Pembulatan Gaji PNS	123.112,00	116.478,00	5,70
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	388.543.035,00	348.170.342,00	11,60
Belanja Tunj. Anak PNS	98.614.387,00	86.436.646,00	14,09
Belanja Tunj. Struktural PNS	616.570.000,00	668.800.000,00	(7,81)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	21.745.000,00	13.220.000,00	64,49
Belanja Tunj. PPh PNS	14.385.452,00	69.087.185,00	(79,18)
Belanja Tunj. Beras PNS	356.958.180,00	338.804.100,00	5,36
Belanja Uang Makan PNS	903.919.000,00	1.046.252.000,00	(13,60)
Belanja Tunjangan Umum PNS	350.635.000,00	364.520.000,00	(3,81)
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	406.140.000,00	5,69
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	4.320,00	4.180,00	3,35
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	33.852.000,00	31.752.000,00	6,61
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	8.080.800,00	7.240.800,00	11,60
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.002.412.000,00	1.010.000.000,00	494,30
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1.744.644.940,00	137.594.300,00	1.167,96
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.800,00	17.670.480,00	(1,64)
Belanja Uang Honor Tetap	1.086.020.000,00	631.400.000,00	72,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	10.405.481.100,00	10.895.225.520,00	(4,50)
Jumlah Belanja Bruto	29.699.488.976,00	23.104.197.991,00	28,55
Pengembalian Belanja Pegawai	(469.181.269,00)	(451.909.229,00)	3,82
Jumlah Belanja Netto	29.230.307.707,00	22.652.288.762,00	29,04

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016



Belanja Barang
Rp83.458.856.862,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp83.458.856.862,00 dan Rp78.811.403.986,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,90 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016.

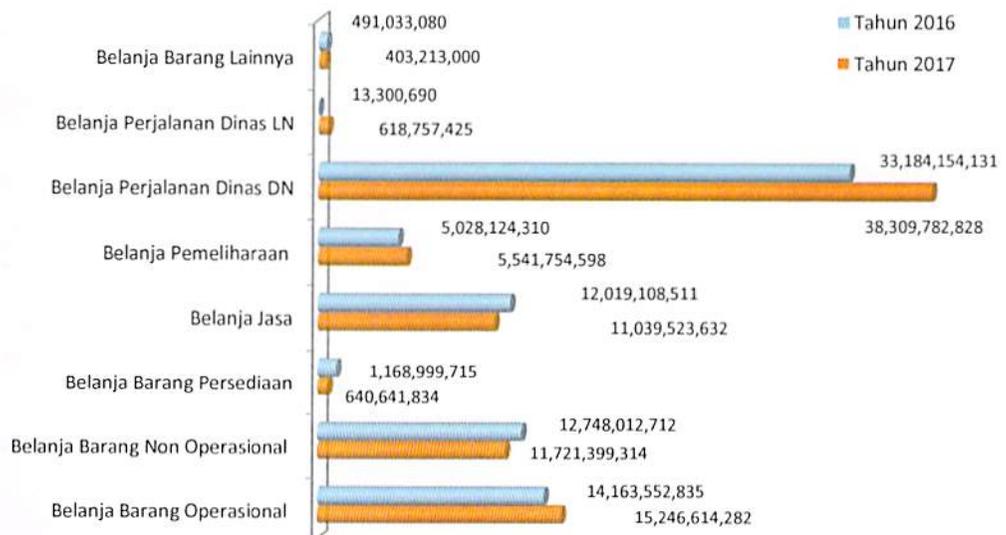
Tabel 5
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Naik/ (Turun)
Belanja Barang Operasional	15.246.614.282,00	14.163.552.835,00	7,65
Belanja Barang Non Operasional	11.721.399.314,00	12.748.012.712,00	(8,05)
Belanja Barang Persediaan	640.641.834,00	1.168.999.715,00	(45,20)
Belanja Jasa	11.039.523.632,00	12.019.108.511,00	(8,15)
Belanja Pemeliharaan	5.541.754.598,00	5.028.124.310,00	10,22
Belanja Perjalanan Dinas DN	38.309.782.828,00	33.184.154.131,00	15,45
Belanja Perjalanan Dinas LN	618.757.425,00	13.300.690,00	4.552,07
Belanja Barang Lainnya	403.213.000,00	491.033.080,00	(17,88)
Realisasi Belanja Barang Bruto	83.521.686.913,00	78.816.285.986,00	5,97
Pengembalian Belanja	(62.830.051,00)	(4.882.000,00)	1.186,97
Realisasi Belanja Barang Netto	83.458.856.862,00	78.811.403.986,00	5,90

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 5

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2017 dan 2016



Belanja Modal
Rp3.311.919.845,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.311.919.845,00, mengalami kenaikan sebesar 38,92 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.383.987.214,00.

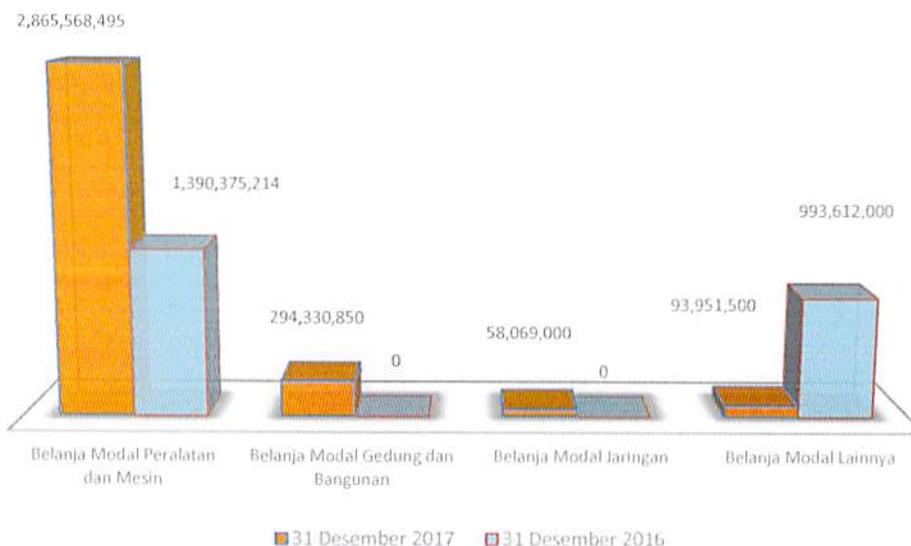
Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.568.495,00	1.390.375.214,00	106,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	294.330.850,00	0,00	~
Belanja Modal Jaringan	58.069.000,00	0,00	~
Belanja Modal Lainnya	93.951.500,00	993.612.000,00	(90,54)
Jumlah Belanja Bruto	3.311.919.845,00	2.383.987.214,00	38,92
Pengembalian Belanja	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah Belanja Netto	3.311.919.845,00	2.383.987.214,00	38,92

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 6

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2017 dan 2016



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp39.433.340,00 yang merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran, berupa akses log in ke dalam aplikasi www.ssp.go.id mengalami gagal log in, dan ketika sudah log in pembuatan id billing pajak sering kali mengalami kegagalan yang kemungkinan dikarenakan banyaknya K/L yang sedang mengakses situs tersebut, sehingga belum bisa diproses lebih lanjut.

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp442.033.463,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp442.033.463,00 dan Rp559.583.369,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

- a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp57.038.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp85.557.000,00 sesuai Kontrak No. 947/SPK/PPK-7.KY/8/2017 periode sewa 01 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018;
- b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp48.888.889,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp73.333.333,00 sesuai Kontrak No. 944/SPK/PPK-7.KY/08/2017 periode sewa 01 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018;
- c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp15.074.167,00 terkait

- Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp45.222.500,00 sesuai Kontrak No. 926/SPK/PPK-7.KY/08/2017 periode sewa 01 September 2017 s.d. 28 Februari 2018;
- d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp61.111.111,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak No. 946/SPK/PPK-7.KY/08/2017 periode sewa 01 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018;
- e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp61.433.333,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp92.150.000,00 sesuai Kontrak No. 948/SPK/PPK-7.KY/08/2017 periode sewa 01 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018;
- f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp76.775.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp92.130.000,00 sesuai Kontrak No. 1214/SPK/PPK-7.KY/11/2017 periode sewa 01 November 2017 s.d. 31 Oktober 2018;
- g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp68.750.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak No. 1070/SPK/PPK-7.KY/10/2017 periode sewa 01 Oktober 2017 s.d. 30 September 2018;
- h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp52.962.963,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2017. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp79.444.445,00 sesuai Kontrak No. 945/SPK/PPK-7.KY/08/2017 periode sewa 01 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00

C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.198.210.301,00 yang merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Komisi Yudisial RI telah mengajukan Permohonan Penghapusan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Kementerian Keuangan RI dengan Nomor Surat:187/ST/KU.02.02/2018 Tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan Penghapusan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Dasar pertimbangan untuk diajukannya permohonan tersebut antara lain:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:68/Pid.SUS/TPK/2014/ PN.Jkt.pst. tanggal 24 Nopember 2014.
2. Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:02/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 03 Maret 2015.
3. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor:1730 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2015 beserta Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan bahwa:
 - a) Menjatuhkan pidana 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- b) Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.198.734.981,- (empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Sesuai dengan asas *nebis in idem* (seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali terhadap kasus yang sama) maka yang bersangkutan tidak perlu lagi melunasi hutangnya tersebut karena sudah diserap kedalam putusan pengadilan yang telah menjatuhkan pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan dasar surat permohonan tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor S-1680/PB.06/2018 Tanggal 14 Februari 2018 perihal Penghapusan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan menjawab dengan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:224/PMK.05/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab Kebijakan Akuntansi Piutang, menyebutkan "*dalam hal TP/TGR masuk ranah hukum dan telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh KL dihapus, selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang*".
2. Atas piutang TP/TGR pada Komisi Yudisial sebesar Rp4.198.210.301,00 telah terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berupa Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor:1730 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2015 beserta Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi

tanggal 30 Maret 2016 dan nilai uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan tersebut yaitu sebesar Rp4.198.734.981,00 telah dapat menutupi seluruh nilai kerugian Negara yang tercatat pada Piutang TP/TGR dimaksud.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Satuan Kerja Komisi Yudisial dapat menghapusbukukan (*write-off*) Piutang TP/TGR dari Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2017 berdasarkan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor:1730 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2015 beserta Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal 30 Maret 2016 yang telah diterima oleh Satuan Kerja Komisi Yudisial. Selanjutnya, piutang tersebut dibukukan dan ditagih oleh eksekutor (Kejaksanaan Agung).

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp4.198.210.301,00) .

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penghapusan terhadap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor S-1680/PB.06/2018 Tanggal 14 Februari 2018 perihal Penghapusan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan tersebut diatas.

Persediaan

Rp600.075.136,00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp600.075.136,00 dan Rp1.230.541.937,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	325.553.547,00	663.767.053,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	48.088.260,00	132.326.920,00
3	Suku Cadang	62.850.000,00	102.000.000,00
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	70.750.100,00	195.129.622,00
5	Persediaan Lainnya	92.833.229,00	137.318.342,00
Jumlah		600.075.136,00	1.230.541.937,00

Grafik 7

Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 2016



Tanah

Rp47.188.389.400,00

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp47.188.389.400,00 dan Rp47.188.389.400,00.

Tabel 8
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017

No	Kode	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	5.780 m ²	47.188.389.400
Jumlah		5.780 m ²	47.188.389.400

Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Peralatan dan Mesin

Rp48.589.855.918,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp48.589.855.918,00 dan Rp46.258.991.222,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.576.382.469,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp40.013.473.449,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2016	46.258.991.222,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.008.495,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari Penggunaan	534.143.799,00
Saldo per 31 Desember 2017	48.589.855.918,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(40.013.473.449,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	8.576.382.469,00

Penambahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 yaitu pembelian yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.865.568.495,00, Nilai Ekstakomptabel sebesar Rp560.000,00 sehingga Nilai Kapitalisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin kedalam Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.865.008.495,00. Rincian penambahan Aset Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	31	276.490.000,00
2	Alat Rumah Tangga	30	194.518.000,00
3	Alat Studio	19	119.325.000,00
4	Alat Komunikasi	7	598.116.000,00
5	Peralatan Pemancar	1	8.750.000,00
6	Alat Kedokteran	4	11.437.500,00
7	Unit Alat Laboratorium	3	240.025.000,00
8	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1	40.326.000,00
9	Persenjataan Non Senjata Api	6	43.829.720,00
10	Alat Khusus Kepolisian	2	18.804.280,00
11	Komputer Unit	70	849.444.000,00
12	Peralatan Komputer	77	463.942.995,00
Jumlah			2.865.008.495,00

Sedangkan Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 sebesar Rp534.143.799,00 disebabkan adanya Penghentian Penggunaan. Rincian Penghentian Penggunaan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	1.023.000,00
2	Alat Kantor	10	62.077.500,00
3	Alat Rumah Tangga	55	121.536.318,00
4	Alat Studio	7	50.800.716,00
5	Alat Komunikasi	29	23.262.865,00
6	Peralatan Pemancar	2	5.800.000,00
7	Unit Alat Laboratorium	1	575.000,00
8	Komputer Unit	14	170.580.300,00
9	Peralatan Komputer	25	98.488.100,00
Jumlah			534.143.799,00

Gedung dan Bangunan
Rp71.676.580.588,00

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp71.676.580.588,00 dan Rp71.382.249.738,00. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp71.676.580.588,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp12.046.203.734,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2016	71.382.249.738,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	294.330.850,00
Saldo per 31 Desember 2017	71.676.580.588,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(12.046.203.734,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	59.630.376.854,00

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.588.869.628,00

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.588.869.628,00 dan Rp3.530.800.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp139.687.752,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp3.449.181.876,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2016	3.530.800.628,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	58.069.000,00
Mutasi Kurang :	0,00
Penghentian dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2017	3.588.869.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(3.449.181.876,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	139.687.752,00

Rincian Penambahan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Jaringan Listrik	1	19.309.000,00
2	Jaringan Telepon	1	38.760.000,00
Jumlah			58.069.000,00

Aset Tetap Lainnya
Rp1.256.182.536,00

C.10 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.256.182.536,00 dan Rp1.206.231.036,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2016	1.206.231.036,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	49.951.500,00
Saldo per 31 Desember 2017	1.256.182.536,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	1.256.182.536,00

Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	40	49.951.500,00
Jumlah			49.951.500,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(55.508.859.059,00)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah (Rp55.508.859.059,00) dan (Rp51.054.687.626,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel 9
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	47.188.389.400,00	0,00	47.188.389.400,00
2	Peralatan dan Mesin	48.589.855.918,00	(40.013.473.449,00)	8.576.382.469,00
3	Gedung dan Bangunan	71.676.580.588,00	(12.046.203.734,00)	59.630.376.854,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	(3.449.181.876,00)	139.687.752,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.256.182.536,00	0,00	1.256.182.536,00
Jumlah		172.299.878.070,00	(55.508.859.059,00)	116.791.019.011,00

Aset Tak Berwujud
Rp2.304.693.472,00

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp2.304.693.472,00 dan Rp2.260.693.472,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2016	2.260.693.472,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	44.000.000,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian Penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	2.304.693.472,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(1.792.254.982,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	512.438.490,00

Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 10
Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	1.999.442.520,00	(1.638.250.270,00)	361.192.250,00
2	Lisensi	305.250.952,00	(154.004.712,00)	151.246.240,00
	Jumlah	2.304.693.472,00	(1.792.254.982,00)	512.438.490,00

Aset Lain-lain
Rp522.029.174,00

C.13 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp522.029.174,00 dan Rp0,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 11
Daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2017

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	522.029.174,00	(514.385.636,00)	7.643.538,00
	Jumlah	522.029.174,00	(514.385.636,00)	7.643.538,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
(Rp2.306.640.618,00)

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah (Rp2.306.640.618,00) dan (Rp1.512.294.504,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 12

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	2.304.693.472,00	(1.792.254.982,00)	512.438.490,00
2	Aert Lain-lain	522.029.174,00	(514.385.636,00)	7.643.538,00
	Jumlah	2.826.722.646,00	2.306.640.618,00	520.082.028,00

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp131.992.624,00

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp131.992.624,00 dan Rp143.270.757,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat kewajiban yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Langganan Telepon untuk kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2017 sebesar Rp7.401.483,00.
2. Biaya Listrik untuk kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2017 sebesar Rp109.363.652.
3. Biaya Langganan Air untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp7.295.722,00.
4. Biaya Langganan Internet & Telepon (indihome) untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp7.931.767,00.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp72.900.667,00*

C.16 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp72.900.667,00 dan Rp10.512.667,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Di Terima Dimuka sebagai berikut:

1. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp10.512.667,00 merupakan Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m³ di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai 1 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018 sesuai perjanjian No. PERJ-01/BU.KY/9/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.769.000,00.
2. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp62.388.000,00 merupakan Biaya Sewa Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas dan ATM BRI di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sesuai perjanjian No.PERJ-02/UM.KY/I/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp124.776.000,00.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,00*

C.17 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0,00 dan Rp39.433.340,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana tersebut pada Utang kepada pihak ketiga dan pendapatan diterima dimuka.

Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak

per tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih ada kendala dalam proses penyetoran, sehingga pajak tersebut belum diterima oleh Negara.

Ekuitas

Rp118.148.316.347,00

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp118.148.316.347,00 dan Rp120.896.715.248,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp78.157.000,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan penerimaan bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp78.157.000,00 dan Rp82.427.860,00. Pendapatan penerimaan bukan pajak sebagai berikut:

- a) Pendapatan Operasional atas sewa sebagian halaman gedung Komisi Yudisial RI sebesar Rp10.512.667,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m³ di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai 1 September 2016 s.d. 31 Agustus 2017 sesuai perjanjian No. PERJ-01/BU.KY/9/2017 sebesar Rp15.769.000,00.
- b) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa ruang Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp62.388.000,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya Sewa Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas dan ATM BRI di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 02 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sesuai Perjanjian No:PERJ.02/UM-KY/I/2017 Tanggal 02 Januari 2017 sebesar Rp124.776.000,00
- c) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp 5.256.333,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m³ di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 4 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018 sesuai dengan Perjanjian No:PERJ-01/BU.KY/9/2017 Tanggal 04 September 2017 sebesar Rp15.769.000,00

Beban Pegawai
Rp29.230.307.707,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp29.230.307.707,00 dan Rp22.652.288.762,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

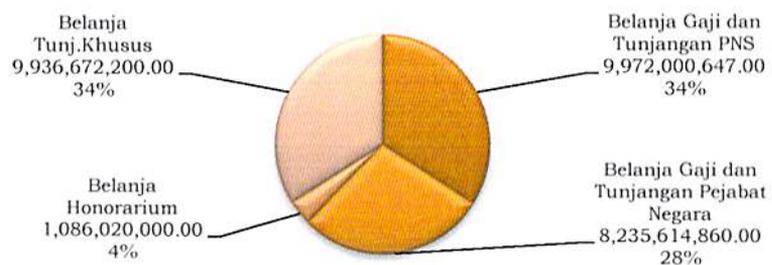
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 13
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.972.000.647,00	9.967.170.020,00	0,05
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	8.235.614.860,00	1.610.401.760,00	411,40
Belanja Honorarium	1.086.020.000,00	631.400.000,00	72,00
Belanja Tunj.Khusus	9.936.672.200,00	10.443.316.982,00	(4,85)
Jumlah	29.230.307.707,00	22.652.288.762,00	29,04

Grafik 8

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2017



Beban Persediaan
Rp1.029.249.567,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.029.249.567,00 dan Rp1.473.298.899,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	779.742.607,00	1.210.152.310,00	(35,57)
Beban Persediaan Lainnya	249.506.960,00	263.146.589,00	(5,18)
Jumlah Beban Persediaan	1.029.249.567,00	1.473.298.899,00	(30,14)

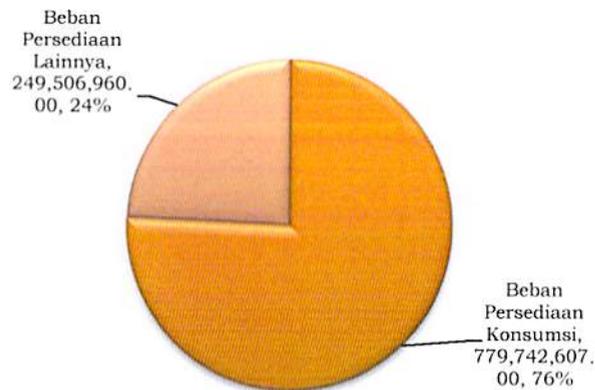
Detail beban persediaan selama tahun 2017 terlihat pada Jurnal Transaksi Mutasi Brang Milik Negara Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Beban Persediaan
Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017

Bulan	Beban Persediaan Konsumsi	Beban Persediaan Lainnya
Januari	92.112.230	25.022.433
Februari	66.213.483	24.790.072
Maret	77.298.710	20.836.485
April	62.909.160	17.679.389
Mei	33.561.930	18.325.917
Juni	41.880.515	15.504.274
Juli	94.963.626	19.901.548
Agustus	38.914.716	21.864.624
September	99.678.510	21.450.436
Oktober	88.022.165	21.798.134
November	44.022.374	21.824.201
Desember	40.165.188	20.509.447
Jumlah	779.742.607	249.506.960

Grafik 9

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2017



Beban Barang dan Jasa
Rp38.057.759.596,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp38.057.759.596,00 dan Rp38.285.784.757,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

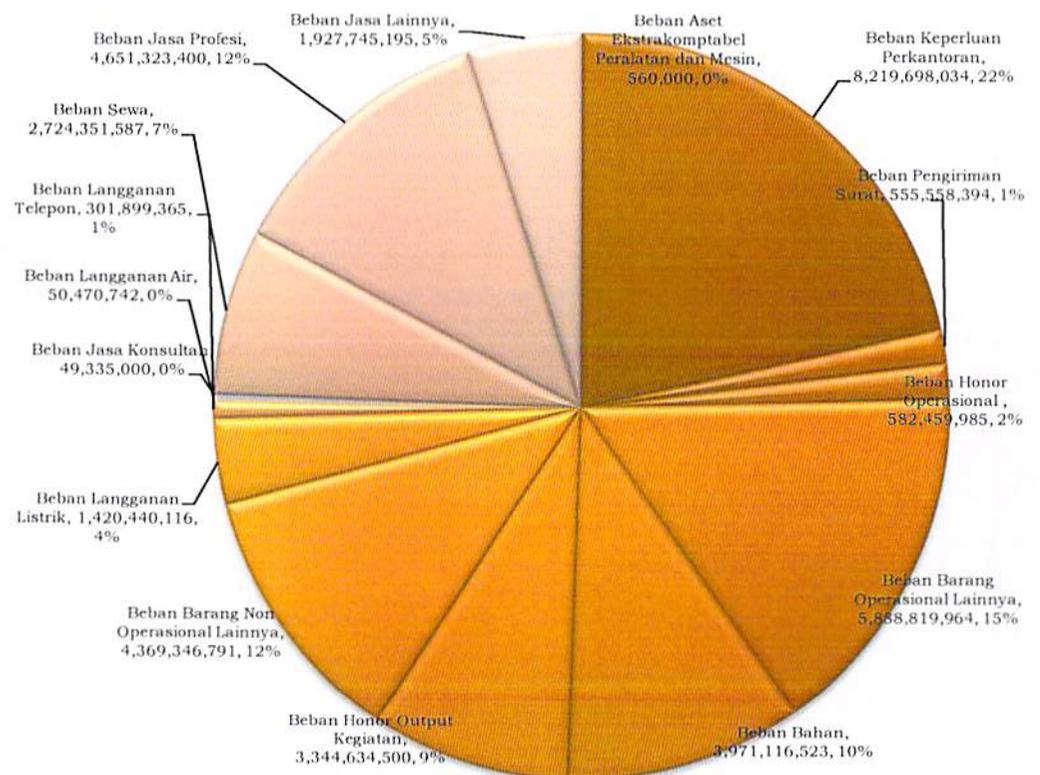
Tabel 16

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	8.219.698.034,00	6.103.463.140,00	34,67
Beban Pengiriman Surat	555.558.394,00	670.193.544,00	(17,10)
Beban Honor Operasional	582.459.985,00	497.540.000,00	17,07
Beban Barang Operasional Lainnya	5.888.819.964,00	6.461.878.845,00	(8,87)
Beban Bahan	3.971.116.523,00	2.925.055.380,00	35,76
Beban Honor Output Kegiatan	3.344.634.500,00	4.624.948.500,00	(27,68)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.369.346.791,00	4.889.029.834,00	(10,63)
Beban Langganan Listrik	1.420.440.116,00	1.773.876.538,00	(19,92)
Beban Langganan Telepon	301.899.365,00	203.819.394,00	48,12
Beban Langganan Air	50.470.742,00	47.790.064,00	5,60
Beban Jasa Konsultan	49.335.000,00	822.634.000,00	(94,00)
Beban Sewa	2.724.351.587,00	2.803.554.893,00	(2,83)
Beban Jasa Profesi	4.651.323.400,00	4.407.109.375,00	5,54
Beban Jasa Lainnya	1.927.745.195,00	2.053.360.000,00	(6,12)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	560.000,00	1.531.250,00	(63,43)
Jumlah	38.057.759.596,00	38.285.784.757,00	(0,59)

Grafik 10

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2017



Beban Pemeliharaan
Rp5.672.595.978,00

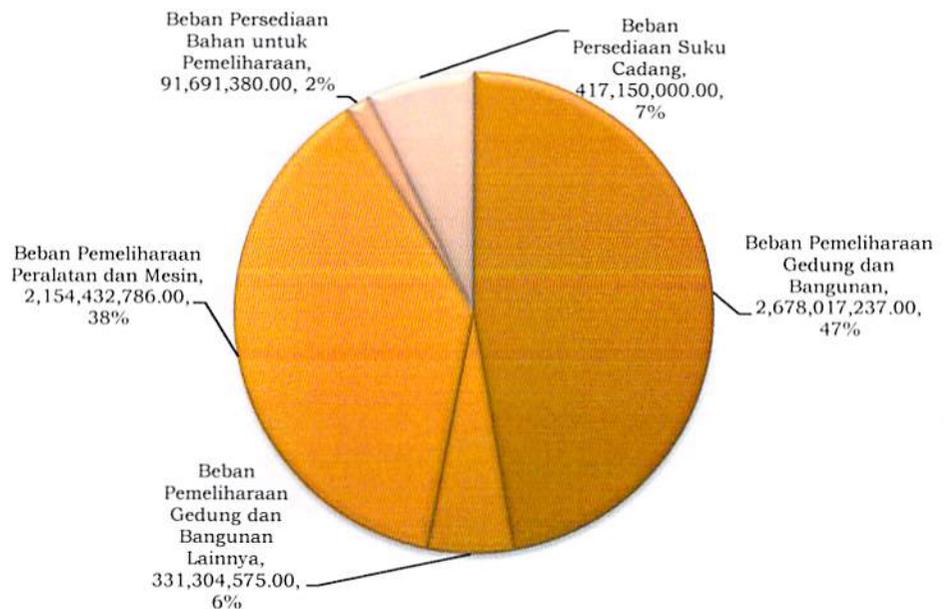
D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.672.595.978,00 dan Rp4.991.532.740,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.678.017.237,00	2.505.085.300,00	6,90
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	331.304.575,00	794.376.080,00	(58,29)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.154.432.786,00	1.405.684.410,00	53,27
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	91.691.380,00	35.926.950,00	155,22
Beban Persediaan Suku Cadang	417.150.000,00	250.460.000,00	66,55
Jumlah	5.672.595.978,00	4.991.532.740,00	13,64

Grafik 11
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017



Beban Perjalanan Dinas
Rp38.922.319.607,00

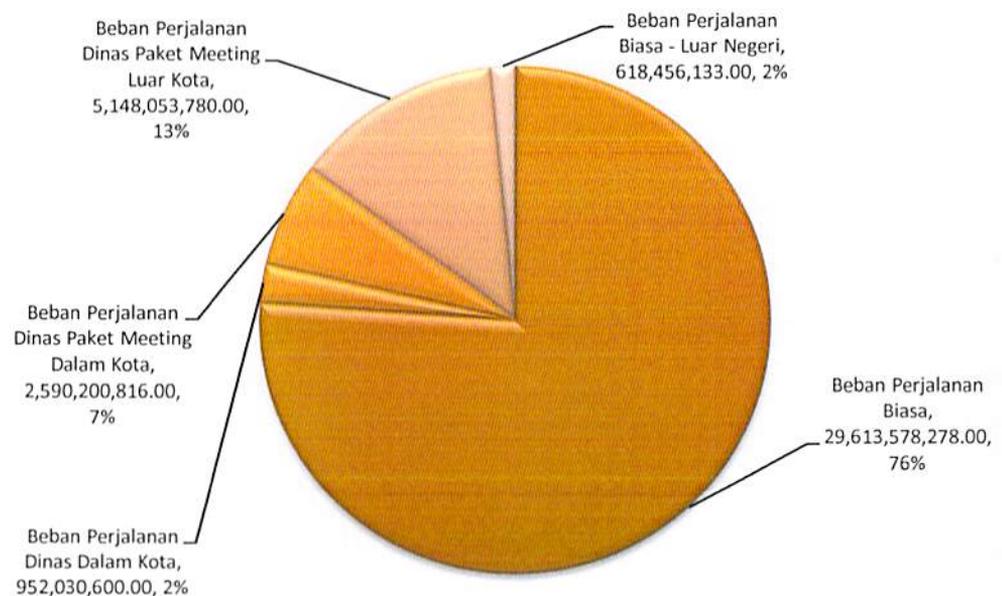
D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp38.922.319.607,00 dan Rp33.196.672.821,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	29.613.578.278,00	24.678.996.613,00	20,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	952.030.600,00	1.077.025.000,00	(11,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.590.200.816,00	3.617.042.578,00	(28,39)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.148.053.780,00	3.810.307.940,00	35,11
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	618.456.133,00	13.300.690,00	4.549,80
Jumlah	38.922.319.607,00	33.196.672.821,00	17,25

Grafik 12
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017



Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp534.743.742,00

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp534.743.742,00 dan Rp3.907.778,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	534.743.742,00	3.907.778,00	13.584,08
Jumlah	534.743.742,00	3.907.778,00	13.584,08

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.257.791.246,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

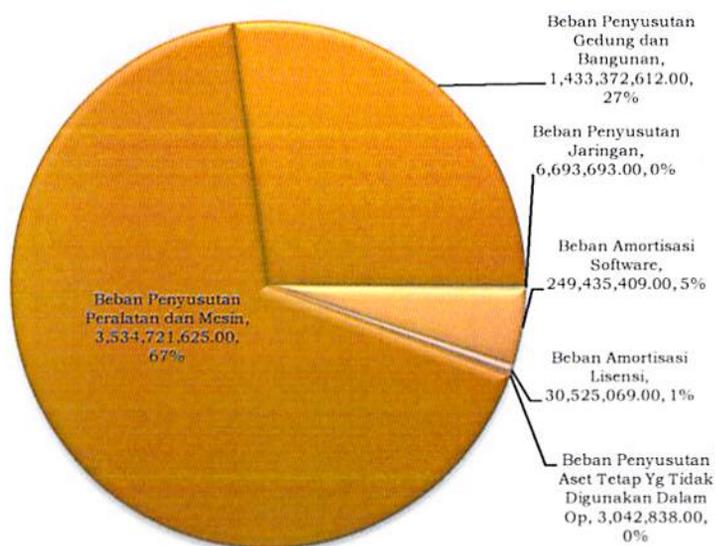
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.257.791.246,00 dan Rp5.429.670.896,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 20

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.534.721.625,00	3.692.401.968,00	(4,27)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.433.372.612,00	1.429.868.674,00	0,25
Beban Penyusutan Jaringan	6.693.693,00	5.483.330,00	22,07
Beban Amortisasi Software	249.435.409,00	271.391.880,00	(8,09)
Beban Amortisasi Lisensi	30.525.069,00	30.525.044,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Yg Tidak Digunakan Dalam Op	3.042.838,00	0,00	~
Jumlah	5.257.791.246,00	5.429.670.896,00	(3,17)

Grafik 13
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017



Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp100.000,00

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp100.000,00 dan Rp1.900.000,00. Pendapatan PNPB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan faktor usia barang.

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp2.840.926,00

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.840.926,00 dan Rp229.715.469,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp50.614.737,00

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp50.614.737,00 dan Rp172.276.658,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp398,00

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp22.493.813,00

3. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp28.120.526,00

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp7.607.472,00*

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.607.472,00 dan Rp159.526.843,00. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Beban Penyesuain Nilai Persediaan sebesar Rp7.336.672,00
2. Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp270.800,00

*Surplus/ (Defisit) - LO
(118.586.344.104,00)*

D.13. Surplus / (Defisit) - LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp118.586.344.104,00) dan (Rp106.165.794.447,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp120.896.715.248,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp120.896.715.248,00 dan Rp124.926.069.695,00.

Defisit LO

Rp(118.586.344.104,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp118.586.344.104,00) dan (Rp106.165.794.447,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan
Rp0,00

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp1.591.821.632,00).

Transaksi Antar Entitas

Rp115.837.945.203,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp115.837.945.203,00 dan Rp103.728.261.632,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp116.001.084.414,00
2. Diterima dari Entitas Lain (Rp163.139.211,00)

Ekuitas Akhir

Rp118.148.316.347,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp118.148.316.347,00 dan Rp120.896.715.248,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Komisi Yudisial RI telah mengajukan Permohonan Penghapusan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Kementerian Keuangan RI dengan Nomor Surat:187/ST/KU.02.02/2018 Tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan Penghapusan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Dasar pertimbangan untuk diajukannya permohonan tersebut antara lain:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:68/Pid.SUS/TPK/2014/ PN.Jkt.pst. tanggal 24 Nopember 2014.
2. Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:02/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 03 Maret 2015.
3. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor:1730 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2015 beserta Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan bahwa:
 - a) Menjatuhkan pidana 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - b) Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.198.734.981,- (empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Sesuai dengan asas *nebis in idem* (seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali terhadap kasus yang sama) maka yang bersangkutan tidak perlu lagi melunasi hutangnya tersebut karena sudah diserap kedalam putusan pengadilan yang telah menjatuhkan

pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan dasar surat permohonan tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor S-1680/PB.06/2018 Tanggal 14 Februari 2018 perihal Penghapusan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan menjawab dengan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:224/PMK.05/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab Kebijakan Akuntansi Piutang, menyebutkan "*dalam hal TP/TGR masuk ranah hukum dan telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh KL dihapus, selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang*".
2. Atas piutang TP/TGR pada Komisi Yudisial sebesar Rp4.198.210.301,00 telah terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berupa Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor:1730 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2015 beserta Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal 30 Maret 2016 dan nilai uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan tersebut yaitu sebesar Rp4.198.734.981,00 telah dapat menutupi seluruh nilai kerugian Negara yang tercatat pada Piutang TP/TGR dimaksud.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Satuan Kerja Komisi Yudisial dapat menghapusbukkan (*write-off*) Piutang TP/TGR dari Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2017 berdasarkan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor:1730 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2015 beserta Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal 30 Maret 2016 yang telah diterima oleh Satuan Kerja Komisi Yudisial. Selanjutnya, piutang tersebut dibukukan dan ditagih oleh eksekutor (Kejaksaan Agung).

Untuk meyakini proses pemindahbukuan/penghapusan (*write off*) Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Komisi Yudisial RI telah melakukan koordinasi serta konfirmasi kepada Kejaksaan Agung RI dalam hal ini Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor:860/SET/KU.02.02/03/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Perihal Permohonan Data Dukung terkait Jurnal Penyesuaian

Pemindahbukuan/ Penghapusan (*write off*) Bagian Lancar Tagihan TP/TGR terkait putusan an. AJK.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Nomor:B-321/O.1.10/Ft.1/04/2018 Tanggal 03 April 2018 perihal Data Dukung terkait Jurnal Penyesuaian Pemindahbukuan/ Penghapusan (*write off*) Bagian Lancar Tagihan TP/TGR terkait putusan an. AJK yang menjelaskan bahwa "*Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mencatat sebagai Tunggakan Uang Pengganti yang Wajib Terdakwa Selesaikan*"

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 17/04/18 10:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kd_komparatif -

NO	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	163,139,211	(163,139,211)	0	78,157,000	119,418,330	(41,261,330)	153
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	163,139,211	(163,139,211)	0	78,157,000	119,418,330	(41,261,330)	153
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	31,155,917,000	29,230,307,707	1,925,609,293	94	26,523,764,000	22,652,288,762	3,871,475,238	85
	BELANJA BARANG	85,253,087,000	83,458,856,862	1,794,230,138	98	82,634,039,000	78,811,403,986	3,822,635,014	95
	BELANJA MODAL	3,331,978,000	3,311,919,845	20,058,155	99	3,363,778,000	2,383,987,214	979,790,786	71
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	119,740,982,000	116,001,084,414	3,739,897,586	97	112,521,581,000	103,847,679,962	8,673,901,038	92
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 100

KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 17/04/18 10:46

Halaman : 1

Prg ID : lap_fra_pen_akun_kl -

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan					
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	100,000	0	100,000	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	140,545,000	0	140,545,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4231	0	140,645,000	0	140,645,000	0
4239	Pendapatan Lain-lain					
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	398	0	398	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,493,813	0	22,493,813	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4239	0	22,494,211	0	22,494,211	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	163,139,211	0	163,139,211	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	163,139,211	0	163,139,211	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 18/04/18 9:48 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_tra_bef_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 100

KOMISI YUDISIAL RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,862,237,000	7,220,920,000	7,220,879,850	0	7,220,879,850	100	40,150
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	192,000	193,000	123,112	2,369	120,743	63.79	72,257
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	386,803,000	390,000,000	388,543,035	0	388,543,035	99.63	1,456,965
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	88,642,000	100,000,000	98,614,387	0	98,614,387	98.61	1,385,613
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	881,588,000	616,570,000	616,570,000	370,000	616,200,000	100	370,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,955,000	25,000,000	21,745,000	0	21,745,000	86.98	3,255,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	136,992,000	14,389,000	14,385,452	0	14,385,452	99.98	3,548
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	402,637,000	357,000,000	356,958,180	0	356,958,180	99.99	41,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,411,326,000	950,000,000	903,919,000	0	903,919,000	95.15	46,081,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	25,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	564,088,000	351,000,000	350,635,000	0	350,635,000	99.9	365,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,775,460,000	10,035,072,000	9,972,373,016	372,369	9,972,000,647	99.38	63,071,353
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	480,748,000	450,000,000	429,240,000	0	429,240,000	95.39	20,760,000
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	5,000	5,000	4,320	0	4,320	86.4	680
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	48,070,000	48,070,000	33,852,000	0	33,852,000	70.42	14,218,000
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	16,464,000	16,464,000	8,080,800	0	8,080,800	49.08	8,383,200
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	1,269,132,000	6,002,412,000	6,002,412,000	0	6,002,412,000	100	0
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	187,077,000	2,009,664,000	1,744,644,940	0	1,744,644,940	86.81	265,019,060
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	24,053,000	25,000,000	17,380,800	0	17,380,800	69.52	7,619,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	2,025,549,000	8,551,615,000	8,235,614,860	0	8,235,614,860	96.3	316,000,140
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,264,800,000	1,098,414,000	1,086,020,000	0	1,086,020,000	98.87	12,394,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	1,264,800,000	1,098,414,000	1,086,020,000	0	1,086,020,000	98.87	12,394,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12,335,965,000	11,470,816,000	10,405,481,100	468,808,900	9,936,672,200	90.71	1,534,143,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	12,335,965,000	11,470,816,000	10,405,481,100	468,808,900	9,936,672,200	90.71	1,534,143,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	27,401,774,000	31,155,917,000	29,699,488,976	469,181,269	29,230,307,707	95.33	1,925,609,293
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,011,349,000	8,316,967,000	8,219,698,034	0	8,219,698,034	98.83	97,268,966
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	560,040,000	625,200,000	555,558,394	0	555,558,394	88.86	69,641,606
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	611,760,000	583,560,000	582,459,985	0	582,459,985	99.81	1,100,015

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 18/04/18 9:48 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 100

KOMISI YUDISIAL RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,569,853,000	5,901,987,000	5,888,897,889	77,905	5,888,819,984	99.78	13,167,036
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	14,753,002,000	15,427,714,000	15,246,614,282	77,905	15,246,536,377	98.83	181,177,623
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,295,694,000	4,056,371,000	3,971,430,523	314,000	3,971,116,523	97.91	85,254,477
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,795,110,000	3,681,360,000	3,365,922,000	21,287,500	3,344,634,500	91.43	336,725,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,755,807,000	4,508,756,000	4,384,046,791	14,700,000	4,369,346,791	97.23	139,409,209
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	11,846,611,000	12,246,487,000	11,721,399,314	36,301,500	11,685,097,814	95.71	561,389,186
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	772,600,000	436,948,000	436,732,737	0	436,732,737	99.95	215,263
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	309,000,000	205,016,000	203,909,097	0	203,909,097	99.46	1,106,903
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,081,600,000	641,964,000	640,641,834	0	640,641,834	99.79	1,322,168
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,200,000,000	1,590,000,000	1,537,280,475	0	1,537,280,475	96.68	52,719,525
522112	Belanja Langganan Telepon	240,000,000	205,008,000	199,874,939	0	199,874,939	97.5	5,133,061
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	55,008,000	46,932,942	0	46,932,942	85.32	8,075,058
522131	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	50,000,000	49,335,000	0	49,335,000	98.67	665,000
522141	Belanja Sewa	3,085,600,000	2,656,260,000	2,606,801,681	0	2,606,801,681	98.14	49,458,319
522151	Belanja Jasa Profesi	4,443,900,000	4,862,160,000	4,671,553,400	20,230,000	4,651,323,400	96.08	210,836,600
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,093,340,000	1,931,355,000	1,927,745,195	0	1,927,745,195	99.81	3,609,805
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,322,840,000	11,349,791,000	11,039,523,632	20,230,000	11,019,293,632	97.27	330,497,368
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,992,770,000	2,693,717,000	2,678,017,237	0	2,678,017,237	99.42	15,699,763
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	219,000,000	331,500,000	331,304,575	0	331,304,575	99.94	195,425
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,264,757,000	2,158,317,000	2,154,432,786	0	2,154,432,786	99.82	3,884,214
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	378,000,000	378,000,000	378,000,000	0	378,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,854,527,000	5,561,534,000	5,541,754,598	0	5,541,754,598	99.64	19,779,402
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	26,976,573,000	29,952,151,000	29,618,310,132	4,731,854	29,613,578,278	98.89	338,572,722
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,675,800,000	1,126,600,000	952,180,600	150,000	952,030,600	84.52	174,569,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,869,936,000	2,722,740,000	2,591,238,316	1,037,500	2,590,200,816	95.17	132,539,184
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,482,278,000	5,186,051,000	5,148,053,780	0	5,148,053,780	99.27	37,997,220
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	39,004,587,000	38,987,542,000	38,309,782,828	5,919,354	38,303,863,474	98.26	683,678,526
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	293,685,000	634,055,000	618,757,425	301,292	618,456,133	97.59	15,598,867

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 18/04/18 9:48 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 100

KOMISI YUDISIAL RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	293,685,000	634,055,000	618,757,425	301,292	618,456,133	97.59	15,598,867
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	350,000,000	404,000,000	403,213,000	0	403,213,000	99.81	787,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	350,000,000	404,000,000	403,213,000	0	403,213,000	99.81	787,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	84,506,852,000	85,253,087,000	83,521,686,913	62,830,051	83,458,856,862	97.97	1,794,230,138
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	959,264,000	2,869,478,000	2,865,568,495	0	2,865,568,495	99.86	3,909,505
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	959,264,000	2,869,478,000	2,865,568,495	0	2,865,568,495	99.86	3,909,505
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	310,000,000	294,330,850	0	294,330,850	94.95	15,669,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	310,000,000	294,330,850	0	294,330,850	94.95	15,669,150
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	0	58,500,000	58,069,000	0	58,069,000	99.26	431,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	58,500,000	58,069,000	0	58,069,000	99.26	431,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	700,000,000	94,000,000	93,951,500	0	93,951,500	99.95	48,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	700,000,000	94,000,000	93,951,500	0	93,951,500	99.95	48,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,659,264,000	3,331,978,000	3,311,919,845	0	3,311,919,845	99.4	20,058,155
	JUMLAH BELANJA	113,567,890,000	119,740,982,000	116,533,095,734	532,011,320	116,001,084,414	97.32	3,739,897,586

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

Kode Lap : LR.A.B.S.
Tangga! : 17/04/18 10:46
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	KOMISI YUDISIAL RI							
51	BELANJA PEGAWAI	27,401,774,000	31,155,917,000	29,699,488,976	469,181,269	29,230,307,707	93.82	1,925,609,293
52	BELANJA BARANG	84,506,852,000	85,253,087,000	83,521,686,913	62,830,051	83,458,856,862	97.9	1,794,230,138
53	BELANJA MODAL	1,659,264,000	3,331,978,000	3,311,919,845	0	3,311,919,845	99.4	20,058,155
	JUMLAH BELANJA (01) KOMISI YUDISIAL RI	113,567,890,000	119,740,982,000	116,533,095,734	532,011,320	116,001,084,414	97.32	3,739,897,586
	JUMLAH BELANJA	113,567,890,000	119,740,982,000	116,533,095,734	532,011,320	116,001,084,414	97.32	3,739,897,586

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2017 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

Tgl. Cetak 18/04/2018
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	39,433,340	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	559,583,369	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	4,198,210,301	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	4,198,210,301
0.0	117111	Barang Konsumsi	663,767,053	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	132,326,920	0
0.0	117114	Suku Cadang	102,000,000	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	195,129,622	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	137,318,342	0
0.0	131111	Tanah	47,188,389,400	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	46,258,991,222	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	71,382,249,738	0
0.0	134113	Jaringan	3,530,800,628	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,206,231,036	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	36,999,368,321
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,612,831,122
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	3,442,488,183
0.0	162151	Software	1,955,442,520	0
0.0	162161	Lisensi	305,250,952	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,388,814,861
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	123,479,643
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	143,270,757
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	10,512,667
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	39,433,340
0.0	391111	Ekuitas	0	120,896,715,248
JUMLAH			177,855,124,443	177,855,124,443

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100

KOMISI YUDISIAL RI

Tgl. Cetak 18/04/2018 9:47 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	442,033,463	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	325,553,547	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	48,088,260	0
0.0	117114	Suku Cadang	62,850,000	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	70,750,100	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	92,833,229	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	47,188,389,400	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	48,589,855,918	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	71,676,580,588	0
0.0	134113	Jaringan	3,588,869,628	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,256,182,536	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	40,013,473,449
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	12,046,203,734
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	3,449,181,876
0.0	162151	Software	1,999,442,520	0
0.0	162161	Lisensi	305,250,952	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	522,029,174	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	514,385,636
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,638,250,270
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	154,004,712
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	131,992,624
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	72,900,667
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	116,001,084,414
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	163,139,211	0
0.0	391111	Ekuitas	0	120,896,715,248
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	0
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	100,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	78,157,000
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	398
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	22,493,813
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	28,120,526
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,220,879,850	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	123,112	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	2,369

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100

KOMISI YUDISIAL RI

Tgl. Cetak 18/04/2018 9:47 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	388,543,035	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	98,614,387	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	616,570,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	370,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	21,745,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	14,385,452	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	356,958,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	903,919,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	350,635,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	429,240,000	0
3.0	511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	4,320	0
3.0	511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	33,852,000	0
3.0	511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	8,080,800	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	6,002,412,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,744,644,940	0
3.0	511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	17,380,800	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	1,086,020,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10,405,481,100	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	468,808,900
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,219,698,034	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	555,558,394	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	582,459,985	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,888,897,869	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	77,905
3.0	521211	Beban Bahan	3,971,430,523	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	314,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,365,922,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	21,287,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,384,046,791	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	14,700,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,420,440,116	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	301,899,365	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	50,470,742	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	49,335,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,724,351,587	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,671,553,400	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	20,230,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,927,745,195	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,678,017,237	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	331,304,575	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,154,432,786	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	29,618,310,132	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100

KOMISI YUDISIAL RI

Tgl. Cetak 18/04/2018 9:47 AM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	4,731,854
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	952,180,600	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	150,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,591,238,316	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	1,037,500
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,148,053,780	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	618,757,425	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	301,292
3.0	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	534,743,742	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,534,721,625	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,433,372,612	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,693,693	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	249,435,409	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	30,525,069	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	3,042,838	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	779,742,607	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	91,691,380	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	417,150,000	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	249,506,960	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	7,336,672	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	560,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	2,840,926	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	270,800	0
JUMLAH			295,579,075,687	295,579,075,687

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100

KOMISI YUDISIAL RI

Tgl. Cetak 17/04/2018 10:45 PM
lap_neraca_kl_komparatif -rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	39,433,340	(39,433,340)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	442,033,483	559,583,369	(117,549,906)	(21.01)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	4,198,210,301	(4,198,210,301)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(4,198,210,301)	4,198,210,301	(100.00)
Persediaan	600,075,136	1,230,541,937	(630,466,801)	(51.23)
JUMLAH ASET LANCAR	1,042,108,599	1,829,558,646	(787,450,047)	(43.04)
ASET TETAP				
Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	0	0.00
Peralatan dan Mesin	48,589,855,918	46,258,991,222	2,330,864,696	5.04
Gedung dan Bangunan	71,876,580,588	71,382,249,738	294,330,850	0.41
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,588,869,628	3,530,800,628	58,069,000	1.64
Aset Tetap Lainnya	1,258,182,536	1,206,231,036	49,951,500	4.14
AKUMULASI PENYUSUTAN	(55,508,859,059)	(51,054,687,626)	(4,454,171,433)	8.72
JUMLAH ASET TETAP	116,791,019,011	118,611,974,398	(1,720,955,387)	(1.45)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,304,693,472	2,260,693,472	44,000,000	1.95
Aset Lain-lain	522,029,174	0	522,029,174	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,308,840,818)	(1,512,294,504)	(794,346,114)	52.53
JUMLAH ASET LAINNYA	620,082,028	748,398,968	(228,316,940)	(30.51)
JUMLAH ASET	118,363,209,638	121,089,932,012	(2,736,722,374)	(2.26)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	131,992,624	143,270,757	(11,278,133)	(7.87)
Pendapatan Diterima Dimuka	72,900,667	10,512,667	62,388,000	593.46
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	39,433,340	(39,433,340)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	204,893,291	193,216,764	11,676,527	6.04
JUMLAH KEWAJIBAN	204,893,291	193,216,764	11,676,527	6.04
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	118,148,316,347	120,896,715,248	(2,748,398,901)	(2.27)
JUMLAH EKUITAS	118,148,316,347	120,896,715,248	(2,748,398,901)	(2.27)
JUMLAH EKUITAS	118,148,316,347	120,896,715,248	(2,748,398,901)	(2.27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	118,363,209,638	121,089,932,012	(2,736,722,374)	(2.26)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 18/04/18 9:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 18/04/18 9:00 AM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	78,157,000	82,427,860	(4,270,860)	(5.181)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	78,157,000	82,427,860	(4,270,860)	(5.181)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	78,157,000	82,427,860	(4,270,860)	(5.181)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	29,230,307,707	22,652,288,762	6,578,018,945	29.039
Beban Persediaan	1,029,249,567	1,473,298,899	(444,049,332)	(30.14)
Beban Barang dan Jasa	38,057,759,596	38,285,784,757	(228,025,161)	(0.596)
Beban Pemeliharaan	5,672,595,978	4,991,532,740	681,063,238	13.644
Beban Perjalanan Dinas	38,922,319,607	33,196,672,821	5,725,646,786	17.248
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	534,743,742	3,907,778	530,835,964	13,584.087
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 18/04/18 9:47 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 18/04/18 9:00 AM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,257,791,246	5,429,670,896	(171,879,650)	(3.166)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	118,704,767,443	106,033,156,653	12,671,610,790	11.951
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(118,626,610,443)	(105,950,728,793)	(12,675,881,650)	11.964
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,740,926)	(227,815,469)	225,074,543	(98.797)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	100,000	1,900,000	(1,800,000)	(94.737)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,840,926	229,715,469	(226,874,543)	(98.763)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	43,007,265	12,749,815	30,257,450	237.317
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	50,614,737	172,276,658	(121,661,921)	(70.62)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,607,472	159,526,843	(151,919,371)	(95.231)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	40,266,339	(215,065,654)	255,331,993	(118.723)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(118,586,344,104)	(106,165,794,447)	(12,420,549,657)	11.699
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(118,586,344,104)	(106,165,794,447)	(12,420,549,657)	11.699

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 100

KOMISI YUDISIAL RI

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 18/04/18 9:45 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --rekon17

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	120,896,715,248	124,926,069,695	(4,029,354,447)	(3.225)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(118,586,344,104)	(106,165,794,447)	(12,420,549,657)	11.699
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(1,591,821,632)	1,591,821,632	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(1,591,821,632)	1,591,821,632	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	115,837,945,203	103,728,261,632	12,109,683,571	11.674
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,748,398,901)	(4,029,354,447)	1,280,955,546	(31.791)
EKUITAS AKHIR	118,148,316,347	120,896,715,248	(2,748,398,901)	(2.273)

Sesuai dengan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor:S-3383/PB/2018 Tanggal 12 April 2018 Perihal Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, berdasarkan Daftar Rekapitulasi Revaluasi BMN terjadi Kenalkan Nilal Aset Tetap.

Daftar Nilai Aset Tetap

Akun	Uraian Akun	Jumlah
131111	Tanah	226.330.350.000
133111	Gedung dan Bangunan	92.956.180.850
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.106.621.201)
➤ Sumber Data dari Laporan Keuangan Audited		

Daftar Revaluasi Aset Tetap

Akun	Uraian Akun	Jumlah
391114	Revaluasi Aset Tetap Tanah	(179.141.960.600)
391114	Revaluasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(21.279.600.262)
391114	Revaluasi Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11.327.765.459)
➤ Sumber Data dari Direktorat APK dan DJKN (17 April 2018)		

Saturan Kerja Konsolidasi Komisi Yudisial RI melakukan Jurnal Koreksi untuk menurunkan kembali Nilai Aset Tetap sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
391114	Revaluasi Aset Tetap	179.141.960.600	
131111	Tanah		179.141.960.600
➤ Jurnal ini untuk mengeliminasi kenaikan nilai aset tetap akibat revaluasi BMN ➤ Jurnal ini telah mencakup koreksi atas jurnal penyesuaian nilai aset tetap sebelum revaluasi menjadi nilai buku sebelum revaluasi dan penyesuaian nilai aset tetap dari nilai buku sebelum revaluasi menjadi nilai wajar hasil revaluasi			

Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
391114	Revaluasi Aset Tetap	21.279.600.262	
133111	Gedung dan Bangunan		21.279.600.262
➤ Jurnal ini untuk mengeliminasi kenaikan nilai aset tetap akibat revaluasi BMN ➤ Jurnal ini telah mencakup koreksi atas jurnal penyesuaian nilai aset tetap sebelum revaluasi menjadi nilai buku sebelum revaluasi dan penyesuaian nilai aset tetap dari nilai buku sebelum revaluasi menjadi nilai wajar hasil revaluasi			

Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
391114	Revaluasi Aset Tetap	11.327.765.459	
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		11.327.765.459
<p>➤ Jurnal ini untuk mengeliminasi kenaikan nilai aset tetap akibat revaluasi BMN</p> <p>➤ Jurnal ini telah mencakup koreksi atas jurnal penyesuaian nilai aset tetap sebelum revaluasi menjadi nilai buku sebelum revaluasi dan penyesuaian nilai aset tetap dari nilai buku sebelum revaluasi menjadi nilai wajar hasil revaluasi</p>			

Terdapat Koreksi Atas Akumulasi dan Beban Penyusutan

Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	388.182.926	
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		388.182.926
<p>➤ Sumber Data dari Direktorat APK dan DJKN (17 April 2018)</p>			

Nilai Aset Tetap setelah Jurnal Koreksi

Akun	Uraian Akun	Jumlah
131111	Tanah	47.188.389.400
133111	Gedung dan Bangunan	71.676.580.588
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.046.203.734)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA**

GEDUNG SYAFRUDIN PRABUMEHARA LANTAI 11 UTARA,
JL. LAPANGAN BANTENG TEBER NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 344230 PES. 4501, 3442551 FAKS/DMU : 3442948 LAMAN : www.djkn.kemendpu.go.id

**NOTA KESEPAKATAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
PADA KOMISI YUDISIAL RI - 100
TAHUN 2017**

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2017, di Aula Lantai 3 KPKNL Jakarta V, Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Radityarini Pranawengrum
NIP : 19750722 200212 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Barang Milik Negara II B
Direktorat Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Budiharto
NIP : 19611213 198311 1 001
Jabatan : Kepala Subbagian Pertengkapan
Kementerian/Lembaga : Komisi Yudisial RI

bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga tersebut di atas, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama menyatakan telah melakukan pembahasan verifikasi dan validasi atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap berdasarkan data Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian dan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Penilaian Kembali BMN di lingkungan Komisi Yudisial RI Tahun 2017 dan data SIMAK-BMN dan SAIBA yang tertuang pada aplikasi e-Rekon&LK, dengan hasil sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Radityarini Pranawengrum
NIP 19750722 200212 2 002

Pihak Kedua

Budiharto
NIP 19611213 198311 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LANTAI 11, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710,
TELEPON (021) 3449230 pos. 4601, 3442948 FAKSIMILI (021) 3442940; LAMAN www.djkn.kominfo.go.id

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
PADA KOMISI YUDISIAL RI - 100
TAHUN 2017

1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017

a. Hasil Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap yang dilakukan tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) BMN, terdapat kenaikan nilai BMN objek Penilaian Kembali BMN pada Komisi Yudisial RI sebesar Rp211.749.326.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Akun	Nilai Buku			Nilai Wajar	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Jml	Administrasi	Inventarisasi			
1.	Tanah	1	47.188.389.400	1	47.188.389.400	226.330.350.000	179.141.950.600
2.	Bangunan	1	60.054.484.279	1	60.054.484.279	92.661.850.000	32.607.365.721
TOTAL		2	107.242.873.679	2	107.242.873.679	318.992.200.000	211.749.326.321

Rincian hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN *terlampir*.

b. Koreksi Penilaian Kembali BMN

Terhadap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut di atas, telah dilakukan koreksi kedalam aplikasi SIMAK BMN oleh masing-masing Salter di lingkungan Komisi Yudisial RI dengan total nilai koreksi sebesar Rp211.749.326.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Akun	Nilai Koreksi dalam Aplikasi SIMAK BMN					Total
		120	121	205	221	321	
1.	Tanah	-	-	179.141.950.600	-	-	179.141.950.600
2.	Bangunan	-	-	32.607.365.721	-	-	32.607.365.721
JUMLAH				211.749.326.321			211.749.326.321

Rincian *terlampir*.

2. Kesesuaian LHIP dan Koreksi

Berdasarkan data hasil Penilaian Kembali BMN dan koreksi yang telah dilakukan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kenaikan nilai BMN hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN sebagaimana LHIP dengan koreksi yang telah dilakukan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna melalui aplikasi SIMAK BMN pada Komisi Yudisial RI.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

- 2 -

3. Kesesuaian Koreksi Hasil Penilaian Kembali BMN Dalam Laporan Keuangan

Koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap yang dilakukan tahun 2017 pada Komisi Yudisial RI yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan melalui aplikasi SAIBA sampai dengan posisi per 30 Nopember 2017 adalah sebesar Rp211.749.326,321,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Akun	Koreksi Dalam SIMAK BMN			Koreksi Dalam SAIBA			Gesah
		120	205	Total	301114	301116	Total	
1.	Tanah	-	179.141.960.600	179.141.960.600	179.141.960.600	-	179.141.960.600	-
2.	Bangunan	-	32.607.365.721	32.607.365.721	32.607.365.721	-	32.607.365.721	-
Jumlah			211.749.326.321	211.749.326.321	211.749.326.321		211.749.326.321	

Rincian terlampir.

Berdasarkan data koreksi hasil Penilaian Kembali BMN yang telah dilakukan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kenalkan nilai BMN atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Komisi Yudisial RI yang dilakukan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna melalui aplikasi SIMAK BMN telah disajikan dengan benar dan sesuai dalam Laporan Keuangan melalui aplikasi SAIBA.

Kepala Subbagian Perlengkapan



Budiharto
NIP 19611213 198311 1 001



LAMPIRAN B HOTA KESEPAKATAN
 VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PERALAMAN KEMBALI BIJIN
 PADA KOREKSI YUDISIAL RI - 100

Nomor Urut	Identitas BIJIN			Nilai Ekuiv RUBal Invest	Nilai Wajar	Koreksi (Perumusan)	Koreksi SBIJAK ^{*)}	Sudiah LHP-SBIJAK
	Kode Shter (0)	Kode Barang (0)	HUP (0)					
1	1000010199439479000XP	2010104001	1	47.188.389,400	228.330.350,000	178.141.960,600	178.141.960,600	01
				47.188.389,400	228.330.350,000	178.141.960,600	178.141.960,600	
	Total transaksi 2018 Akun Bangunan (133111)			60.054.484,279	92.661.650,089	32.607.165,721	32.607.165,721	
1	1000010199439479000XP	6010101001	1	60.054.484,279	92.661.650,089	32.607.165,721	32.607.165,721	
				60.054.484,279	92.661.650,089	32.607.165,721	32.607.165,721	
	Total Transaksi 2018			107.242.873,679	318.992.200,089	211.749.326,321	211.749.326,321	

*) merupakan seluruh transaksi SBIJAK-BIJIN terkait Inventarisasi dan Peralaman Kembali pada tahun 2017, yaitu transaksi 120, 121, 205, 221, dan 321)